

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. C. (2012). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses pada 31 Oktober 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, J. L. et al. (2012). *Organization Behavior Structure and processes 4th edition*. Singapore: Mc Graw-Hill.
- Himawan, A. et al. (2015). *BI Longgarkan Uang Muka Kredit Rumah dan Kendaraan*. Diakses pada 31 Oktober 2015, dari: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/25/101447126/BI.Longgarkan.Uang.Muka.Kredit.Rumah.dan.Kendaraan>.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penetapan Kriteria Wajib Pajak
- Maman. (2012). *Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Minim Sosialisasi*. Diakses pada 26 Oktober 2015 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/02/17/177285/pajak-progresif-kendaraan-bermotor-minim-sosialisasi>.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maribot P. Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moningka, N. A, Elia, D. P. S, Sabijono, H. (2014). *Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims di Kabupaten Minahasa*. Diakses pada 6 November 2015 dari Universitas Sam Ratulangi.
- Norman. (2012). *Jawa Barat Mulai Memberlakukan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*. Diakses pada 8 November 2015 dari <http://newsmetronasional.blogspot.co.id/2012/01/jawa-barat-mulai-berlakukan-pajak.html>.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan; Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Bank Indonesia No.17/10/PBI/2015 Tentang Rasio *Loan To Value* Atau Rasio *Financing To Value* Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

- Peraturan Gubernur Jawa Barat N0.33 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 tahun 2014 Tentang Tataran Transportasi Wilayah Jawa Barat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rachim, D. A. (2013, 26 September). *KPK dan BPKP: Pajak Kendaraan Bermotor Sumut Bermasalah*. Diakses pada 7 November 2015, dari: <http://mahardikanews.com/view/Daerah/1360/KPK-dan-BPKP--Pajak-Kendaraan-Bermotor-Sumut-Bermasalah.html>.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku I Organizational Behavior*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwono, J. Suhayati, E. (2010). *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Edisi 1 Cetakan 21. Penerbit: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2009). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Suliyanto. (2011). *Perbedaan Pandangan Skala Likert Sebagai Skala Ordinal Atau Skala Interval*. Diakses pada 3 Februari 2016 dari Universitas Jendral Soedirman.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Wursanto. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.